

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TERHADAP PERPARKIRAN DI KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus Kecamatan Sukajadi 2014)**

Oleh :

Asep Rezapahlepi

Aseprezapahlepi@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Parking management is a social phenomenon in the city of Pekanbaru which is in dire need of government attention. If the management of parking is not supervised properly then it is certain the government will be difficult to make the arrangement of the city and the problems that occur will affect the unstable reception area. The data were obtained from the parking sector itself. Organizers and Management Perparkiran Pekanbaru City area under Regulation No. 3 of 2005 on Amendment Pekanbaru City Regional Regulation No. 14 Year 2001 on the Implementation and Management Perparkiran is the Department of Transportation, Communications, and Information Technology. Here are the phenomena that occur in the parking that occurred in the District Sukajadi. Found occurrence of fluctuating revenues parking fees on public roads, caused by parking attendants who are not depositing evidence or parking ticket to the Department of Transportation, No cooperation contract between managers with executive parking as specified in Local Regulation, Karna no cooperation contract, the impact on the irregular implementation of management including the implementation of the field by the parking attendant, triggering disorder vehicular traffic, is still a parking attendant who did not give tickets to the public parking that impact the proceeds from the public parking fees. This research is a descriptive study, in which the author presents and describes how to control the transportation bureau and informati on parking in the city of Pekanbaru a case study in District Sukajadi. And to know the factors that affect the parking supervision. The technique of collecting data is to interview and the key informant is a team of surveillance, parking attendants and community leaders. Results of the study found that the supervision has not been done optimally. This is because the weakness of the sanctions provided for parking attendants were violated and the number of supervisors who lack the resulting lack of supervision performed so many illegal parking. As for some of the factors that affect the implementation of parking control in the city of Pekanbaru is a human resources (HR) as quality inspectors and the number of supervisory personnel in the field, limited funds to

conduct surveillance and a lack of community participation factor against parking in the district Sukajadi.

Keywords: *monitoring, setting standards, corrective actions*

Pendahuluan

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan Jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area pelestrian sebagai lokasi parkir (Riau Pos.co, 12 September 2013). Akibat yang ditimbulkan parkir , sebagai berikut :

1. Berkurangnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
2. Menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas
3. Jalur hijau kehilangan fungsi utamanya menjadi lahan parkir
4. Hilangnya hak pejalan kaki dan penyandang cacat

Penyelenggara dan Pengelolaan Perparkiran berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishub Kominfo).

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir Umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, Pemerintah dan parkir insidentil dilakukan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Keputusan Walikota;
- 2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota;
- 4) Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya dalam Penyelenggaraan

dan Pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan :

- a) Lalu lintas Kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
- b) Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa Pelayanan parkir;
- c) Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan di mulai dengan ditetapkannya Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi : ***"Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama

yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat.

Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD parkir terhadap pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh dishubkominfo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa pengaturan roda 2 dan roda 4 sesuai marka parkir
2. Mengawasi kelengkapan/ketertiban kinerja juru parkir dilapangan
3. Untuk memeta kembali lokasi parkir yang kosong
4. Untuk menangkap atau memproses juru parkir yang ilegal
5. Mengawasi ketertiban dan pengamanan tempat parkir
6. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Mengawal dan mengawasi PAD kota Pekanbaru dalam bentuk retribusi parkir ditepi jalan umum. (*sumber: Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Pekanbaru, 2014.*)

Tabel I.1 Jumlah Lokasi dan Petugas Parkir di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Tahun 2013 s.d 2015

No	Lokasi Parkir	Jumlah Petugas Parkir
1	Jl. Kaswari	4 Orang
2	Jl. Ketitiran dari simp. Jl.KH.Ahmad Dahlan s/d simp.Kaswari	7 Orang
3	Jl. Iklas dari simp.Jl.Tambusai s/d simp.Jl.Tiung Ujung	7 Orang
4	Jl. Lily	4 Orang
5	Jl. Air Hitam dari Simp. Garuda Sakti s/d simp. Akap RM Putih Buana, Jl. Pepaya	8 Orang
6	Jl. Cut Nyak Dhien /RM. Upik dan depan Kantor Dinkes Prov. Riau (Khusus malam)	7 Orang
7	Jl. Kenanga (dari simp. Jl. Teratai s/d simp. Jl. Melur)	8 Orang
8	Jl. Dahlia dari simp. Jl. Teratai s/d simp. Jl. Melati (Sate Ayam)	7 Orang
9	Jl. Jendral dari simp. Jl. Serayu s/d simp. Jl. Paus	8 Orang
10	Jl. Meranti	5 Orang
11	Jl. Durian dari simp. Pepaya s/d simp. KH. Ahmat dahlan.	5 Orang
12	Jl. Tuanku Tambusai (Areal Parkir Ex Terminal Mayang Terurai)	4 Orang

13	Jl. Dagang (Kedai Miso)	2 Orang
14	Jl. Melati (Warung Steak)	2 Orang
15	Jl. Nenas/utama (Cafe Fresh Milk)	1 Orang
16	Jl. Kusuma sisi Barat dan Timur dari simp. Jl. Tuanku Tambusai s/d sepanjang Jl. Kusuma	9 Orang
17	Jl. Pepaya sisi Barat dan Timur dari simp. Jl. Tuanku Tambusai s.d simp. Jl. Mangga	8 Orang
18	Jl. Nenas simp. Jl. Tuanku Tambusai s/d Tuanku Tambusai	5 Orang
19	Jl. KH. Ahmad dahlan Tambusai s/d Lampu merah Teratai	5 Orang
20	Jl. Balam	3 Orang
21	Jl. Rajawali/ Jl. Gardenia	3 Orang
22	Jl. Amilin	4 Orang
23	Jl. Pepaya ujung dari simp. Mangga s/d simp. Gg. Masjid	5 Orang
24	Jl. Melur	5 Orang
25	Jl. Durian- Labuh baru (Pasar pagi)	4 Orang
26	Jl. Cempaka sisi Utara san Selatan dari simp. A. Yani s/d simp. Jl. Melur	8 Orang
27	Jl. Teratai dari simp. Jl. Cempaka s/d Depan Pengadilan Negeri	6 Orang
28	Jl. Bangau/Kaswari dari simp. Jl. A.Dahlan s/d simp.	6 Orang

	Jl. Rajawali	
29	Jl. Durian mulai dari simp. Jl. A.Dahlan s/d simp. Soekarno Hatta	8 Orang
30	Jl. Teratai sari simp. Jl. Cempaka s/d simp. Jl. A. Yani	7 Orang
31	Jl. Alamuddinsyah sisi Selatan dari. Simp. Jl. Teratai s/d Jl. A. Yani	8 Orang
Jumlah		173 Orang

Sumber : Dishubkominfo Kota Pekanbaru Tahun 2015

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pengelolaan perparkiran, ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Tidak ada kontrak kerja sama antara pengelola dengan pelaksana parkir seperti yang ditentukan pada Peraturan Daerah.
2. Karna tidak ada kontrak kerja sama tersebut, berdampak pada tidak teraturnya pelaksanaan pengelolaan termasuk pelaksanaan dilapangan oleh para petugas parkir sehingga memicu ketidaktertiban lalu lintas kendaraan.
3. Masih ada petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir umum yang berdampak kepada hasil penerimaan retribusi parkir umum.
4. Serta masih banyak ditemukan karcis parkir yang ilegal atau palsu yang tidak sesuai dengan karcis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 256 yang berbunyi “Pengadaan Karcis Retribusi Parkir Pada Badan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan diporporasi oleh Dinas Perhubungan”.

5. Ditemukannya petugas parkir yang tidak mengenai seragam dan tanda pengenal petugas parkir saat melakukan tugas parkir umum di Kota Pekanbaru.

Melihat fenomena – fenomena diatas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Dimana penulis mengambil judul penelitian adalah : **“Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terhadap Perpustakaan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi Tahun 2014)”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis mengemukakan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan perpustakaan oleh dishubkominfo di kota pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan perpustakaan di Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pengawasan perparkiran di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan perparkiran di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemikiran penulis, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- b. Menambah bahan pustaka dalam Ilmu Pemerintahan, mengenai Pengawasan Perparkiran di Kota Pekanbaru dan dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif

adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarnya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengawasan Perparkiran di Kota Pekanbaru

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan standar
 2. Mengadakan penelitian
 3. Mengadakan tindakan perbaikan
1. Menentukan standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai suatu ketentuan yang harus diikuti, ketentuan atau standar dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa :

- a. Adanya pembagian tugas secara jelas

Dalam suatu pengorganisasian sangat dibutuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian kerja dalam pengawasan perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi, dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan :

- a. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) parkir meliputi :

- a. Sekretaris UPTD parkir
- b. Bagian administrasi
- c. Bagian keuangan
- d. Bagian pengawasan
- e. Koordinator

- b. Waktu pengawasan

Dalam melakukan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi dibutuhkan waktu, strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kinerja petugas, apakah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan atau tidak. Dimana dishubkominfo terjun langsung dilapangan tanpa sepengetahuan petugas parkir. Hal ini bertujuan untuk melihat kinerja petugas atau juru parkir. Dan waktu yang digunakan dishubkominfo dibidang pengawasan dalam melakukan razia/ mengawasi parkir ini tergantung program dishubkominfo tersebut yang mana mereka hanya melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali.

- c. Sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan dan pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan terjadi atau kesalahan yang sama.

2. Melakukan tindakan penelitian

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh pihak dishubkominfo kota Pekanbaru. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang di ambil untuk

mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Penilaian tersebut berupa :

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang dilakukan hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan masyarakat atau petugas parkir itu sendiri. Berikut persepsi UPTD parkir terhadap laporan yang diterima dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan di kecamatan sukajadi kota Pekanbaru.

b. Laporan lisan

Dalam hal pengukuran terhadap penilaian kinerja UPTD parkir sendiri dalam pelaksanaan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi, dilihat dari adanya laporan-laporan dari setiap pihak baik pihak petugas, selain itu juga dilakukan razia pada setiap jangka waktu tertentu atau peninjauan langsung kelapangan. Adapun jenis laporan yang dibuat adalah laporan secara lisan.

c. Pengawasan langsung

Dalam melakukan pengawasan secara langsung dengan cara turun kelapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap petugas atau juru parkir di Kecamatan Sukajadi agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

dishubkominfo melakukan pengawasan parkir di Kecamatan Sukajadi dengan mendatangi langsung di tempat lokasi parkir. Tapi walau demikian masih juga ditemukan petugas parkir yang tidak mematuhi peraturannya akibat pengawasan yang hanya dilakukan tiga bulan sekali.

Dari keterangan diatas terhadap tindakan penilaian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan dishubkominfo terhadap petugas parkir melalui UPTD parkir yang ada serta adanya pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan parkir seperti parkir ilegal atau petugas-petugas parkir ilegal.

3. Melakukan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa :

a. Pemberian sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan parkir. Baik yang dilakukan oleh koordinator maupun juru parkir adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh dishubkominfo kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila koordinator parkir ini melakukan kesalahan, tidak bisa mengatasi semua permasalahan dilapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir, tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerja sama, dan lain-lain, akan dikenakan berupa

teguran dan pemberhentian. Sementara sanksi bagi petugas/juru parkir yang melanggar adalah berupa teguran pertama diberikan secara langsung dilapangan, dan diberhentikan secara sepihak. Walaupun telah diterapkan sanksi bagi koordinator dan petugas parkir tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terjadi.

b. Menambah jumlah pengawas

Salah satu bentuk perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan parkir di kota Pekanbaru adalah dengan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kendala terhadap keterbatasan untuk mendata seluruh lokasi parkir.

usaha perbaikan dalam pengawasan belum dikatakan baik atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sanksi yang diberikan terhadap juru parkir yang melanggar dan mengenai jumlah pengawas yang kurang yang mengakibatkan minimnya pengawasan yang dilakukan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan parkir di kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan parkir di kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir di kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang

sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi. Meski perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir oleh UPTD parkir dishubkominfio kota Pekanbaru terhadap perparkiran khususnya di Kecamatan Sukajadi, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, system, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas perhubungan dapat dilihat melalui :

- a. Kualitas petugas pengawas
- b. Jumlah petugas pengawas

Kualitas dan jumlah petugas pengawas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik

tahu standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan. Dalam melakukan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi yang ditunjuk adalah dishubkominfo kota Pekanbaru.

2. Dana/ biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan parkir sendiri pihak dishubkominfo mengatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak dinas mendapatkan dana dari wali kota. Hal ini karena pihak dishubkominfo tidak memiliki anggaran sendiri dalam rangka pengawasan parkir. Misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait pengawasan berupa razia parkir dan sosialisasi peraturan dan lain-lain misalnya melalui media cetak. Razia parkir sendiri merupakan program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang di danai oleh wali kota.

3. Faktor partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan parkir oleh UPTD parkir dishubkominfo kota Pekanbaru terhadap perparkiran di Kecamatan Sukajadi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan parkir ini dapat berupa pengaduan atau laporan adanya pelanggaran pada dishubkominfo. Partisipasi

masyarakat juga dapat kritik/ laporan dan saran yang disalurkan melalui media cetak.

Selain itu bentuk partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas parkir yang tidak resmi. Hal ini sesuai dengan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan atau membayar jasa parkir jika tidak ada karcis yang diberikan.

Faktor partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam keberhasilan pengawasan parkir. Hal ini dikarenakan inti dari pengawasan parkir tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat disini terdapat hak-haknya yang harus diberikan oleh petugas parkir. Termasuk pada prakteknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang merupakan bagian dari pembangunan khususnya pengawasan dalam penerimaan retribusi parkir akan hak dan kewajibannya belum optimal. Jika masyarakat sebagai pengguna jasa parkir memberikan laporan atau pengaduan dan mempertanyakan petugas parkir yang tidak memberi karcis maupun tidak memakai pakaian seragam dalam pengelolaan parkir, pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan. Termasuk juga kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengingatkan masyarakat pihak pertama yang merasakan dan menggunakan jasa parkir tersebut.

Masyarakat bukan malah menguasai lahan-lahan yang dijadikan bahan parkir dan tidak mau diajak bekerjasama yang otomatis akan menyulitkan pemerintah.

Penutup

A. Kesimpulan

- a. Penentuan standar dilihat dari segi pembagian tugas, waktu pengawasan serta sosialisasi dari dinas perhubungan terhadap parkir ini masih belum terlaksana dengan baik, karena pengawasan atau razia yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru hanya dilakukan 3 bulan sekali. Maka wajar masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti petugas-petugas ilegal yang merajalela, petugas parkir yang tidak memakai atribut.
- b. Tindakan penilaian dari segi pengawasan lapangan, laporan lisan, serta laporan tertulis dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan minimnya laporan yang diterima dinas perhubungan kota yang disebabkan oleh masyarakat yang kurang pemahaman atau merasa enggan untuk menyampaikan laporan-laporan kepada dinas perhubungan.

- c. Tindakan perbaikan dari segi menambah jumlah pengawas serta pemberian sanksi dari dinas perhubungan kepada juru parkir juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan petugas parkir belum jera terhadap sanksi yang diberikan, karena sanksinya hanya berupa teguran-teguran.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan parkir di kota Pekanbaru Khususnya di Kecamatan Sukajadi :

- a. Faktor sumber daya manusia yang meliputi jumlah personil dan kecakapan personil berkaitan dengan pemahaman prosedur kerja dan tanggung jawab yang diemban memiliki pengaruh dalam kinerja yang dihasilkan dalam melakukan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru. Dari segi kinerja UPTD parkir secara personil dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik sedangkan dalam substansi pengawasan dilapangan (koordinator parkir) belum berjalan secara optimal, disebabkan kurangnya personil koordinator parkir dan koordinasi antar koordinator parkir dengan pihak UPTD parkir yang kurang.
- b. Faktor biaya menentukan lancarnya program kegiatan yang dilaksanakan. Biaya dalam pelaksanaan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi sangat penting untuk melakukan

sosialisasi, kegiatan operasional untuk kelancaran pelaksanaan proses pengawasan. Keterbatasan dana menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar.

- c. Sedangkan faktor partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan parkir itu sendiri. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sukajadi sangat dibutuhkan untuk membantu pihak Pemerintah dalam mengurangi penyimpangan yang terjadi dengan memberikan laporan kepada pemerintah baik itu laporan, kritik dan saran maupun partisipasi berupa kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat terhadap tujuan dari pengawasan parkir yang dilakukan. Masyarakat seharusnya lebih tegas jika ada petugas yang tidak memberikan karcis disaat memarkirkan kendaraan.

B. SARAN

Dari peneliti yang telah melakukan penelitian dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dan dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pengawasan parkir di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sukajadi, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Pemerintah melakukan pembinaan baik aparat pemerintahannya maupun kepada petugas parkir sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia dan kinerja yang lebih baik lagi.
- b. Bagi pihak dishubkominfo sebaiknya meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait agar dapat melaksanakan pengawasan dengan lebih mudah, terutama koordinasi antara unit dari yang paling bawah maupun dengan pihak masyarakat.
- c. Seharusnya Pemerintah maupun dishubkominfo lebih menegaskan dan menjalankan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi sebagai upaya melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap penyimpangan yang terjadi. Hal ini penting untuk dilakukan agar bisa memberikan ketegasan dalam pelaksanaan parkir apabila terjadi pelanggaran, terutama pengawasan parkir di Kecamatan Sukajadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Efendy Sofian, 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- H. Bohari. 1992, *Pengawasan Negara*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Harahap, Safri. 2006. *Sistem Pengawasan Manajemen (management control system)*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Nitisemito, Alex. 1995. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 2006. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1998, *Proses Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sukanto. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5, BPFE*, Yogyakarta: Penerbit Andi..
- Syafri Sofyan, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Quantum.
- Terry. G.R. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Winardi. 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- SKRIPSI**
- Rian. 2014. *Pengawasan Terhadap Usaha Bidang Perikanan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012 (Studi Kasus Pengawasan Pengusaha Ikan Di Waduk Plta Koto Panjang Kecamatan Xiii Koto Kampar)*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Skripsi, Lulu Meirine. 2009. *Pengelolaan Retribusi Parkir umum di kota Tembilahan*.
- WEBSITE**
- Riau Pos.co, 12 September 2013
<http://kajianpustaka.blogspot.com>